



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 29 Oktober 2021

Kepada

Nomor : 188.341/3313/II/2021.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Usulan Program Pembentukan
Perda Tahun 2022

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumsel

di -

Palembang

Berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Program Pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas.

Selanjutnya dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, bersama ini disampaikan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang diajukan Kepala Perangkat Daerah terkait dan hasil identifikasi Perda yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

Kami mengharapkan kiranya usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk selanjutnya disepakati dan ditetapkan menjadi Propemperda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perkenan diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

USULAN PROPEMPERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

A. RAPERDA USULAN PERATURAN DAERAH

NO	JUDUL / NAMA RAPERDA	OPD PENGUSUL	TAHUN USULAN	DRAFT RAN-PERDA	NA	KONSEPSI/ KETERANGAN	SK TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ranperda tentang Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2020	√	√	√	-	Sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 16 Juli 2020 Nomor 049/881/DPKP/2020 hal usulan Propemperda Jasa Konstruksi.
2.	Ranperda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan UKM	2021	-	-	-	-	Sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 800/316/Diskop&UKM/VI/2021 tentang Penyampaian Judul Ranperda untuk Propemperda Tahun 2022.
3.	Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2042	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	2021	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan Nota Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang tanggal 7 Juni 2021 Nomor 590/2050/PU.BM.TR/VII/2021 hal Penyampaian Usulan Perda Tahun 2022. - Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang tanggal 800/5029/ND/BM.TR/X/2021 tanggal 27 Oktober

								2021 Perihal Tanggapan terhadap penyiapan Bahan Usulan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sumatera Selatan.
4.	Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Jakabaring Sport City	Biro Perekonomian	2021	-	-	-	-	Sesuai Nota Dinas Tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 766/ND/IV.3/2021 perihal usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Jakabaring Sport City
5.	Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim	Biro Perekonomian	2021	-	-	-	-	Sesuai Nota Dinas Tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 766/ND/IV.3/2021 perihal usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim.
6	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.	BPKAD	2021	-	-	-	-	
7	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	BPKAD	2021	-	-	-	-	
8.	Ranperda tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	BPKAD	2021	-	-	-	-	

B. RAPERDA YANG TERDAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

NO	JUDUL / NAMA RAPERDA	BAHAN KELENGKAPAN					KETERANGAN
		PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TAHUN PENGUSULAN	DRAFT RAPERDA	KONSEPSI/ PENJELASAN	SK TIM	
1	Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah	3	4	5	6	7	8
1.		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2021	-	-	-	Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 30 Agustus 2021, Nomor 556/2584/Disbudpar.1/2021 hal Penyampaian Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Perda dan Perkada terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Berita Acara yang dibuat oleh Biro Hukum dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel tanggal 29 Juli 2021
2.	Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2021	-	-	-	Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tanggal 30 Agustus 2021, Nomor 556/2584/Disbudpar.1/2021 hal Penyampaian Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Perda dan Perkada terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Berita Acara yang dibuat oleh Biro Hukum dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel tanggal 29 Juli 2021

3.	Perda tentang Sektor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.	Dinas ESDM	2021	-	-	-	Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 050/696/DESDM/II-3/2021 hal Penyampaian Usulan Propemperda dan Propemperkada Tahun 2022.
4.	Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2021				Surat dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 5 Agustus 2021, Nomor 049/1493/DPKP/2021 hal Penyampaian Hasil Identifikasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Berita Acara yang dibuat oleh Biro Hukum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel tanggal 26 Juli 2021
5.	Perda 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	2021				Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tanggal 06 Agustus 2021, Nomor 660/1327/DLHP/Bid.IV/2021 hal Penyampaian Data Identifikasi Perda dan Perkada dan Berita Acara yang dibuat oleh Biro Hukum dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel tanggal 3 Agustus 2021
6.	Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.	Bappeda	2021				Berita Acara yang dibuat oleh Biro Hukum dan BAPPEDA Provinsi Sumsel tanggal 4 Agustus 2021

Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan	2021				Surat Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 42 perihal penyampaian usulan pencabutan peraturan daerah provinsi Sumatera Selatan Sektor Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel.
Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2021				Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 9 Agustus 2021, Nomor 005/3605/Nakertrans/2021 Penyampaian Hasil Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Berita Acara yang dibuat oleh Biro Hukum Disnakertrans Provinsi Sumsel tanggal Juli 2021

a.n GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. S. A SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 10 November 2021

Kepada

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumsel

C.q Ketua Badan Pembentukan

Peraturan Daerah DPRD

Provinsi Sumsel

di -

Palembang

Nomor : 188.341/3464/II/2021.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Usulan Propemperda
Tahun 2022

Sehubungan Surat kami terdahulu tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 188.341/3313/II/2021 Hal Usulan Program Pembentukan Perda Tahun 2022 dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan usulan Propemperda Tahun 2022 terdapat beberapa Ranperda yang mengalami penundaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

No.	Judul Ranperda	Keterangan
1.	Ranperda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi dan UKM)	Ditunda karena pada Tahun 2022 baru diprogramkan penyusunan Naskah Akademik sehingga belum dapat melengkapi dokumen untuk penetapan Propemperda.
2.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Dinas PU BM&TR dan Dinas Kelautan dan Perikanan)	Sesuai ketentuan Ranperda RTRW harus diintegrasikan dengan Ranperda tentang RZWP3K, dengan demikian perlu dimintakan kembali persetujuan substansi ke Kementerian Teknis Terkait (Kementerian PU PR, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian/Lembaga Teknis Terkait lainnya.
3.	Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Biro Perekonomian)	Ranperda ini ditunda pembahasannya dikarenakan masih dalam tahap pengkajian secara mendalam.
4.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Dinas Kebudayaan dan	Ranperda ini ditunda pembahasan dikarenakan masih menunggu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait bidang Pariwisata dan Kebudayaan

4/11/21

5.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	Ranperda ini ditunda pembahasan dikarenakan masih menunggu Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan dalam proses perubahan nomenklatur pemisahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang saat ini masih dalam proses rekomendasi (fasilitasi) Kemendagri RI.
6.	Ranperda tentang Sektor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan (Dinas ESDM)	Masih menunggu Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pendelegasian kewenangan dibidang ESDM kepada Pemerintah Provinsi
7.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Masih melakukan persiapan dan koordinasi dengan kementerian teknis, terkait dengan penyelenggaraan bangunan dan gedung di Daerah sebagai dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan)	Masih menunggu peraturan pelaksanaan terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup sebagai dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
9.	Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang RPJPD Provinsi Sumsel Tahun 2005-2025 (Bappeda)	Menunggu perubahan Perda RTRW sebagai dasar penyusunan RPJPD

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rancangan Peraturan Daerah yang dapat diproses dalam Propemperda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

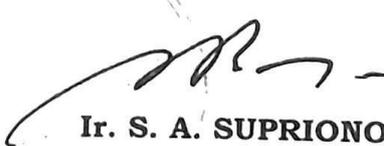
No.	Judul Ranperda	Dokumen Kelengkapan	
		Draft Raperda	Naskah Akademik/ Penjelasan(Konsepsi)
1.	Ranperda tentang Jasa Kontruksi (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	ada	ada
2.	Ranperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	ada	ada
3.	Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Kehutanan)	ada	ada

4.	Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Jakabaring Sport City (Biro Perekonomian)	ada	ada
5.	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 (BPKAD)	Ranperda Rutin dan wajib	
6.	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (BPKAD)	Ranperda Rutin dan Wajib	
7.	Ranperda tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (BPKAD)	Ranperda Rutin dan Wajib	

Kami mengharapkan kiranya usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk selanjutnya disepakati dan ditetapkan menjadi Propemperda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perkenan diucapkan terima kasih.

**a.n GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007**

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai Laporan) di Palembang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon . (0711) 352388-312421 Faksimili . (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website www.sumselprov.go.id

Palembang, 5 Januari 2022

Kepada

Nomor : 188.34/0026/II/2022.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian kembali Usulan
Penambahan Propemperda
Tahun 2022

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumsel
C.q. Ketua Badan Pembentukan
Peraturan Daerah DPRD
Provinsi Sumatera Selatan

di -

Palembang

Sehubungan dengan Surat Permohonan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal 23 Desember 2021 Nomor 049/2500/DPKP/2021 dan penambahan 1(satu) usulan Propemperda dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel tanggal 31 Desember 2021 Nomor 2655/DPMPTSP.II/XII/2021, bersama ini kami ajukan kembali usulan 2 (dua) Ranperda untuk diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 masing-masing sebagai berikut :

- a. Ranperda tentang Jasa Konstruksi (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel)
- b. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. (Dinas PMPTSP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mengharapkan kembali permohonan tersebut dapat disetujui dan diagendakan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan kembali dalam Propemperda Tahun 2022.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ir. S. A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan) di Palembang
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang